

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara demokrasi, yang mana dalam demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu dari wujud dari pelaksanaan demokrasi tersebut adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu), baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bertepatan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Kota Medan turut serta dalam memeriahkan pesta demokrasi tersebut dengan pemilihan Walikota beserta Wakil Walikota yang akan menjabat untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Pasca masa Orde Baru berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan Undang-Undang perdana yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara langsung. UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999. Terjadinya perubahan ini mengubah sistem Pilkada yang sebelumnya kepala daerah dipilih melalui sistem perwakilan yaitu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian, berubah menjadi sistem Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat. Dalam kebijakan pemerintahan daerah, masa Orde Baru memandang bahwa daerah harus mengikuti segala kebijakan yang berasal dari pusat karena, persatuan Indonesia akan lebih mudah dipertahankan dengan hal tersebut. Sementara itu, pada era reformasi memandang sebaliknya bahwa apabila daerah lemah maka, akan dapat merusak persatuan Indonesia. Sebab, setiap

masing-masing daerah memiliki hak dan tugas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ciri khas dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Keberadaan Pilkada merupakan suatu potret daripada partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan langsung kepala daerahnya masing-masing. Partisipasi politik masyarakat merupakan hal sangat berarti untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah. Dengan adanya Pilkada, kekuasaan tidak akan hanya bersifat terpusat tetapi, daerah juga akan ikut andil dan memiliki peran serta bagian dalam mengatur daerahnya sendiri.<sup>1</sup> Dengan adanya Pilkada diharapkan lebih dapat menampung aspirasi masyarakat serta dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki cakupan wilayah yang terbentang luas dan selain itu juga di dalamnya terdapat masyarakat yang multikultural baik dari segi agama, suku, ras, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan banyak hal lainnya. Maka daripada itu, pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Sebab, pemerintahan daerah merupakan bagian terdekat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya pemerintahan daerah diharapkan dapat memahami kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Maraknya Pilkada memberikan kewenangan kepada daerah-daerah tertentu untuk memperoleh kebebasan dan pengakuan politik di daerahnya. Dalam hal ini pula, tidak dapat dipungkiri tumbuhnya politik identitas seperti

---

<sup>1</sup>Gun Gun Heryanto, dkk, *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 80.

<sup>2</sup>Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), hlm. 6.

hal yang berkaitan dengan etnis, agama, ideologi dan lain sebagainya. Etnisitas juga memiliki keterkaitan dengan budaya. Setiap komunitas yang kurang lebih seragam memiliki budayanya masing-masing yang merupakan simbol dari suku bangsa tersebut. Dalam hal ini lahirlah suatu sikap primordialisme yaitu keterikatannya dengan kelompok sukunya sendiri, yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan kesamaan budaya, bahasa dan juga agama. Faktor seperti etnisitas, budaya, agama, dan lainnya memiliki pengaruh terhadap ikatan emosional seseorang ataupun kelompok.<sup>3</sup> Namun, tidak pula menutup kemungkinan di masa saat ini ikatan primordial tersebut perlahan mulai meluntur karena semakin kritisnya masyarakat dan adanya akulturasi ataupun asimilasi budaya di daerah tersebut.

Indonesia merupakan negara yang multikultural dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri, baik dari segi agama, ras, bahasa, budaya dan banyak hal lainnya. Dan demikian pula Allah telah menciptakan alam ini dengan berbagai keragamannya. Maka dengan demikian, sepatutnya kita harus menghargai perbedaan yang ada tersebut, karena hal itu sudah menjadi ketentuan Allah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat/49:13).

---

<sup>3</sup>Abdullah Idi, *Politik Etnisitas Hindia-Belanda: Dilema dalam pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

Pemimpin merupakan bagian terpenting dalam berjalannya suatu negara. Sebab, pemimpin sangat menentukan kebijakan suatu negara. Dan dalam Islam pemimpin juga demikian penting, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah di Madinah, serta para khulafaurrasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilihan kepemimpinan pada masa khulafaurrasidin Abu Bakar yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat antara kaum Muhajirin dan Anshor, lalu Umar bin Khattab yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah antara Abu Bakar dan beberapa sahabat, setelah itu dipilihnya Usman bin Affan melalui dewan musyawarah atau formatur, serta Ali bin Abi Thalib yang didaulat setelah terjadinya pemberontakan oleh masyarakat pada pemerintahan Usman.<sup>4</sup> Dalam hal ini, dapat dilihat dari hadits Rasulullah dibawah ini bahwa pentingnya dalam memilih pemimpin bahkan, dalam kelompok terkecil sekalipun.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!"* (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

Selain itu juga terdapat hadits riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa kita harus patuh kepada pemimpin selama ia berpedoman pada Al-quran meskipun pemimpin tersebut berasal dari budak yang hitam.

---

<sup>4</sup>Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 86.

<sup>5</sup>Syamsul Rijal Hamid, *1500++ Hadis dan Sunah Pilihan*, (Jakarta: Kaysa Media, 2017), hlm. 88.

عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya: “Bersumber dari Yahya bin Hushain, dia berkata: "Aku mendengar nenekku bercerita; sesungguhnya ia mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam. pernah berkhotbah dalam waktu haji wada'. Beliau bersabda: "sekalipun seorang hamba yang ditugaskan mengurus kalian namun dia menuntun kalian berdasarkan Kitab Allah, maka kalian harus tetap tunduk dan taat kepadanya." Dengan isnad ini, Ibnu Basysyar, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan sebuah hadits dari Syu'bah yang senada dengan hadits di atas. Namun ada tambahan: "yaitu seorang budak berkebangsaan Ethiopia (Habsyi).”<sup>6</sup>

Selain itu, hampir senada dengan hadits diatas yang menjelaskan keharusan memiliki pemimpin dan juga berpedoman kepada Al-quran dan sunnahnya dijelaskan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

<sup>6</sup>Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj AI Qusyairi An Naisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim jilid III*, terj. Adib Bisri Musthofi dk, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hlm. 559.

*Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*  
(Q.S. An- Nisa/4:59).

Terkait dengan penerapan Al-Qur'an dan sunnahnya yang baik maka, hendaklah kita memilih pemimpin yang seakidah atau seorang muslim karena tentulah ia paham mana yang baik dan buruk terkait agama Islam. Dan selain itu, Allah SWT juga telah memerintahkannya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*(Q.S. Al-Maidah/5:51)

Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini mengalami kondisi yang berbeda dari Pilkada sebelumnya, di mana pada Pilkada ini dilakukan dalam suasana pandemi Covid-19. Pilkada yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda sampai pada bulan Desember 2020, yang dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh wilayah di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Penundaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Djohan Lubis, *“Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultural?”* Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi Ke-42 (Jakarta: Juni 2020), hlm. 3.

Pada Pilkada yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, terdapat dua pasangan yang mencalonkan diri untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan. Kedua pasangan calon ini akan bersaing dan berlomba-lomba dalam mengambil hati masyarakat untuk memperoleh dukungan suara, sehingga dapat memenangkan kontestasi Pilkada. Adapun nomor urut, nama pasangan calon dan partai yang memberikan dukungan kepada para calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2020 Kota Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Nomor Urut, Nama dan Partai Pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan 2020**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si H. Salman Al-Farisi, Lc., M.A	Partai Demokrat dan PKS.
2.	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M H. Aulia Rachman, S.E	PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, PSI, Hanura dan PPP.

Sumber:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923091923-32549719/Pilkada-medan-panggung-duel-dua-nasution>

Persaingan antara kedua pasangan calon Walikota Medan pada Pilkada ini cukup menarik perhatian. Akhyar Nasution merupakan seorang pertahana yaitu Wakil Walikota pada periode sebelumnya, dan bersaing melawan Muhammad Bobby Afif Nasution yang merupakan seorang pengusaha dan menantu daripada Presiden Joko Widodo. Akhyar Nasution yang berpasangan dengan Salman Al-Farisi yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. Sementara itu Muhammad Bobby Afif

Nasution berpasangan dengan Aulia Rachman yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Medan.<sup>8</sup>

Perilaku pemilih adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh seseorang untuk menentukan pemimpin atau kandidat yang akan dipilih.<sup>9</sup> Dalam Pemilu maupun Pilkada perilaku pemilih memiliki peranan yang penting dalam menentukan jumlah suara yang akan diperoleh calon kepala daerah. Maka dari itu, seharusnya kontestan yang akan melaju pada pemilihan kepala daerah haruslah mengetahui dan memahami dengan benar karakteristik masyarakat yang ada di wilayah pemilihan tersebut. Perilaku politik masyarakat biasanya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Lingkungan seseorang pun memiliki pengaruh terhadap sikap atau perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya. Selain itu, dalam hal ini terdapat banyak sekali faktor penyebab yang memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih dalam menyetujui pilihannya pada pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Misalnya faktor seperti suku, agama, ras, ideologi, partai politik, visi misi atau program kerja dan lain sebagainya.

Pilkada yang merupakan ajang pesta dan sarana demokrasi rakyat, yang didalamnya rakyat bebas untuk menentukan atau menyetujui pilihannya kepada yang mereka anggap dapat memegang amanah dan menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dan sepenuhnya dapat mementingkan atau mendahulukan kepentingan rakyat, serta menyampingkan kepentingan pribadinya dan kelompok yang telah mengusungnya. Kelayakan pemimpin daerah akan ditentukan oleh masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat harus cerdas dan cermat dalam

---

<sup>8</sup>CNN Indonesia, “Pilkada Medan, Panggung Duel Dua Nasution,” 09 September 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923091923-32-549719/pilkada-medan-panggung-duel-dua-nasution>, pada tanggal 08 Juli 2021.

<sup>9</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), hlm. 145.

menjatuhkan pilihannya. Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu penentu sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada sangat ditentukan oleh pemilih atau masyarakat. Oleh sebab itu, kesadaran, pemahaman, serta kemampuan masyarakat dalam memilih calon-calon pemimpin daerah yang bermutu serta penuh pengabdian demi kemajuan daerahnya menjadi hal yang penting dalam menghasilkan demokrasi yang bermutu lewat Pilkada.

Pasangan calon Pilkada yang maju untuk menjadi Walikota Medan 2020 jika dilihat secara keseluruhan merupakan putra daerah yang merupakan kelahiran dari Medan, Sumatera Utara. Namun jika dilihat dari etnisnya memiliki kesamaan, yang mana calon Walikota nomor urut 1 dan 2 yaitu Akhyar Nasution dan Muhammad Bobby Afif Nasution sama-sama berasal dari etnis Mandailing. Sementara itu, kedua calon Wakil Walikota nomor urut 1 dan 2 yaitu Salman Al-Farisi dan Aulia Rachman merupakan calon yang sama-sama berasal dari keturunan suku Minang.<sup>10</sup>

**Tabel 1. 2 Jumlah Perolehan Suara Sah di Kelurahan Kota Matsum II Pada Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Medan 2020**

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	Persen
1.	Akhyar Nasution Salman Al-Farisi	2.977	80,2%
2.	Muhammad Bobby Afif Nasution Aulia Rachman	734	19,8%

Sumber: <https://Pilkada2020.kpu.go.id>

<sup>10</sup>Harian Batak Pos, "Mebangkitkan Batang Terendam, Walikota Medan Perlu Sosok Seperti Surkani," 14 September 2020, diakses dari <https://www.harianbatakpos.com/membangkitkan-batang-terendam-walikota-medan-mendatang-perlu-sosok-seperti-surkani/>, pada tanggal 25 April 2021.

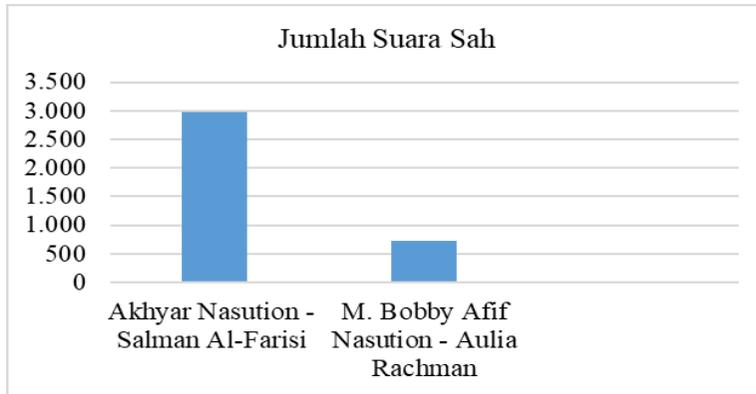


Diagram 1

Hasil perolehan suara pada Pilkada Walikota Medan secara keseluruhan, pasangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman berhasil memperoleh suara lebih unggul yaitu, 393.533 atau setara dengan 53,5%. Sementara itu, pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi memperoleh suara sebanyak 342.480 atau setara dengan 46,5%. Sementara itu, untuk hasil perolehan suara di Kelurahan Kota Matsum II, pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi memperoleh suara yang lebih unggul, yaitu 2.977 suara (80,2%). Sedangkan pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman memperoleh 734 (19,8%) suara di wilayah tersebut. Dalam hal ini, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menetapkan pilihannya, misalnya faktor ras, agama, status sosial, partai, visi misi, program kerja dan lainnya.

Kelurahan Kota Matsum II merupakan suatu bagian dari Kecamatan Medan Area, terdapat di Kota Medan yang terdiri dari 16 lingkungan. Berdasarkan etnisnya, mayoritas penduduk Kota Matsum II beretnis Minang, sebanyak 42,3% (5.127) beretnis Minang, 23,3% (2.822) beretnis Melayu, 14,6% (1.769) beretnis Jawa, 9,2% (1.120) beretnis Mandailing, 6,5% (776)

beretnis Aceh, dan 4,1% (497) etnis lainnya.<sup>11</sup> Terkait dengan hal ini, maka etnis Minang tentu memiliki pengaruh dalam memperoleh besaran suara di kelurahan tersebut.

Dari data tersebut kedua pasangan calon sama-sama memiliki potensi yang cukup kuat untuk menang pada Pilkada Walikota Medan 2020. Dan terbukti pasangan calon Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman dapat memperoleh suara terbanyak. Namun, untuk di wilayah Kelurahan Kota Matsum II, Pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi mengungguli perolehan suara di wilayah. Kemungkinan dikarenakan status Akhyar Nasution yang merupakan pertahana. Dan selain itu, masyarakat beretnis Minang tentu memiliki budaya ataupun nilai-nilai yang diyakini dan bisa jadi dapat menjadi penentu mereka dalam menentukan sikap, tidak terkecuali dalam menentukan pilihannya. Salah satu dari nilai yang sangat erat hubungannya yaitu, keterkaitan antara agama atau nilai religius dengan budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari filosofi Minangkabau yaitu, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*”<sup>12</sup> Dan jika dilihat dari latar belakangnya pendidikannya yang merupakan tamatan pesantren serta lulusan Universitas Islam Madinah Arab Saudi, Salman Al-Farisi termasuk sosok yang religius dan beliau juga dikenal sebagai ulama.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas. Maka, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti. Hal ini dikarenakan, pemilihan kepala daerah merupakan suatu kegiatan memilih pemimpin yang dapat menentukan kebijakan dan dampak yang akan diperoleh daerah

---

<sup>11</sup>Muhammad Azmi Ramadhan, “*Peranan Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Akidah Masyarakat Di Kelurahan Kota Matsum II*”, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UINSU, 2016).

<sup>12</sup>Yoserizal dan Asrinaldi, “*Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum*”*Jurnal Demokrasi* Vol. VIII No. 2, (Padang: 2009), hlm. 195.

kedepannya. Dengan demikian, tulisan ini akan difokuskan pada judul **“Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Walikota Medan 2020 (Studi Kasus: Etnis Minang Di Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini memberikan batasan fokus yang terdapat pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perilaku masyarakat beretnis Minang di Kelurahan Kota Matsum II pada Pilkada Walikota Medan 2020?
2. Faktor atau aspek apa yang mempengaruhi masyarakat etnis Minang di kelurahan Kota Matsum II dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Walikota Medan 2020?

## **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah ini bertujuan untuk mengetahui pokok permasalahan ataupun hal-hal yang selayaknya patut dikaji dan agar tidak keluar dari batasan pembahasan. Selain itu, untuk meminimalisir kesalahpahaman ataupun perbedaan makna terkait dengan pengertian terkait judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu terkait dengan perilaku pemilih etnis Minang pada Pilkada 2020 di Kelurahan Kota Matsum II. Maka dengan demikian, disini terdahulu dijelaskan istilah-istilah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Adapun uraian istilahnya sebagai berikut:

### **1. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada merupakan suatu kegiatan memilih pemimpin daerah baik itu, gubernur, bupati maupun Walikota untuk masa jabatan lima tahun yang dilakukan oleh secara langsung masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat 1.<sup>13</sup>

## 2. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang yang untuk menentukan pilihannya, apakah dia ikut memilih atau tidak, dan siapa yang akan dia pilih, serta penyebab ia memilih kandidat tersebut.<sup>14</sup>

## 3. Etnis Minangkabau

Etnis Minangkabau atau Minang merupakan suku bangsa yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Selain itu, merupakan etnis yang menganut sistem matrilineal.<sup>15</sup>

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada tujuannya, maka yang menjadi tujuan dari penulis mengangkat judul penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perilaku masyarakat beretnis Minang di Kelurahan Kota Matsum II pada Pilkada Walikota Medan 2020.
2. Untuk mengetahui tentang faktor atau aspek yang mempengaruhi masyarakat etnis Minang di Kelurahan Kota Matsum II dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Walikota Medan 2020.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu:

---

<sup>13</sup>Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 1.

<sup>14</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, hlm. 145.

<sup>15</sup>Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 241-242.

1. Secara Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perilaku pemilih etnis pada Pilkada.
  - b. Penulis mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam perkembangan keilmuan, terutama dibidang ilmu politik.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat menambah wawasan penulis tentang fenomena yang terdapat di masyarakat.
  - b. Penulis mengharapkan penelitian dapat berguna untuk mengetahui sikap atau perilaku khususnya etnis Minang dan keterkaitannya dengan Pilkada.
  - c. Penulis mengharapkan penelitian dapat berguna untuk menjadi bahan informasi yang dirujuk bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema hampir serupa.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini penting yang berguna untuk pembandingan antar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Selain itu, kajian terdahulu ini juga dapat menjadi rujukan tambahan data penelitian. Adapun demikian, terdapat beberapa kajian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Ridwan, Fakultas Syariah UIN Sulthan Saifuddin Jambi, dengan judul "*Perilaku Pemilih Masyarakat Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018*". Penelitian ini membahas tentang perilaku pemilih di RT 25 dan 28 yang berdasarkan pada tiga pendekatan, yaitu sosiologi, psikologi dan

rasional. Adapun faktor yang dominan adalah kesamaan daerah, figur kandidat dan visi misi yang dibawa.

2. Skripsi karya Irfan Saputra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Perilaku Politik Elit Adat: Studi Atas Kemenangan Bupati Indra Catri Dan Wakil Bupati Trinda Farhan Satria Pada Pemilukada 2015 Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat*". Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut kemenangan bupati Indra Catri dan Trinda Farhan Satria memiliki keterkaitan atau sangat dipengaruhi oleh preferensi elit adat (*Datuak*), sebab Indra Catri juga merupakan seorang pemangku adat. Preferensi elite adat ini sangat mempengaruhi pilihan masyarakat, karena masyarakat wilayah tersebut termasuk tunduk atau menghormati pemangku adat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kemenangannya yaitu karena, wilayah Indra Catri yaitu Agam Timur yang memiliki 11 kecamatan, dibandingkan wilayah Agam Barat yang hanya 6 kecamatan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah suara, serta pepatah Minang "*caro basuku tagak di nagari, caro banagari tagak di nagari*". Selain itu faktor kedekatan emosional juga merupakan salah satu penyebabnya, yaitu karena saat Indra Catri menjabat ia menjalin hubungan yang dekat dengan para elite adat lainnya. Serta faktor lainnya yaitu karena pengalaman dan kebijakannya pada periode sebelumnya yaitu revalitas adat.
3. Tesis karya Jenny Ester Pandiangan, Program Pascasarjana USU, dengan judul "*Analisis Preferensi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana preferensi masyarakat Dairi pada Pilkada 2018 dan penilaian preferensi didasarkan atas 17 indikator. Preferensi yang

paling dominan Pilkada Kab. Dairi 2018 ini yaitu program yang diajukan oleh calon dan selanjutnya adalah figur kandidat.

4. Jurnal karya Faiz Albar Nasution, dkk, dalam "Politeia: Jurnal Ilmu Politik" dengan judul "*Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020*". Jurnal ini membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Kota Medan dari tahun ke tahun yang tergolong rendah dan selain itu juga memprediksi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Adapun perbedaan itu, yaitu dari subjek yang diteliti, yang mana mayoritas dari penelitian tersebut lebih meneliti kepada masyarakat umum yang multikultural. Dan meskipun penelitian dari Irfan Saputra memiliki kemiripan dari segi budaya, namun pada penelitian tersebut ia meneliti tentang elite adat, yang mana pilihan elite adat dan masyarakat awam tentulah berbeda, serta instrumen penelitian yang digunakan juga berbeda. Dan selain itu juga ada yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi kota Medan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Umumnya, laporan hasil penelitian tersusun dalam lima bab dan selanjutnya pada masing-masing bagian bab memiliki beberapa subbab. Hal bertujuan agar fokus pembahasan penelitian ini lebih terstruktur dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, merupakan bab yang berisikan: latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORITIS**, pada bagian bab ini penulis memaparkan mengenai teori yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diteliti yaitu: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Perilaku Pemilih, dan Etnis Minang.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, merupakan bab yang menyajikan dan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, pada bagian bab ini penulis akan membahas dan memaparkan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini terbagi kedalam dua sub yaitu perilaku masyarakat beretnis Minang di Kelurahan Kota Matsum II pada Pilkada Walikota Medan 2020, serta faktor atau aspek yang mempengaruhi masyarakat etnis Minang di kelurahan Kota Matsum II dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Walikota Medan 2020.

**BAB V PENUTUP**, merupakan bagian bab yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pemaparan hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk kedepannya.